**KATA PENGANTAR**

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 - 2024 ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan kami sadari masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Renstra Perubahan ini kami buat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut, dan kepada pihak pihak yang telah membantu sehingga selesainya penyusunan Renstra Perubahan ini kami mengucapkan terima kasih.

Kuala Mandor B, 2019

**CAMAT KUALA MANDOR B**

**Drs. YANSEN SIBARANI**

NIP.19631101 198603 1 008

**DAFTAR ISI**

Hal

KATA PENGANTAR ……………………………...………………………………………. i

DAFTAR ISI ………..……………………………………………………………………… ii

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I. PENDAHULUAN   * 1. Latar Belakang………………………………………………….   2. Landasan Hukum………………………………………………   3. Maksud Dan Tujuan…………………………………………..   4. Sistematika Penulisan …..……………………………………   BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD   * 1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …………………………………………………………….   2. Sumber daya Perangkat Daerah …………………………….   3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………..   4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………………………   BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK  DAN FUNGSI  3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas  Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah …………………  3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………  3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Perubahan ………………  3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian  Lingkungan Hidup Strategis…………………………………..  BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN  4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah …………………...  BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………….  BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...  BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………  BAB VII. PENUTUP ……………………………………………………………… | 1  3  7  7  9  17  22  30  32  33  34  35  43  46  48  57  59 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra SKPD), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok danfungsi SKPD.

Dengan telah dilaksanakannya tahap RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Pertama Tahun 2019-2024 , yang diprioritaskan pada :

1. Pembangunan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, Agama dan Mental Spritual;
2. Pembangunan, Penyiapan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Air Bersih, Energi/Listrik, Telekomunikasi dan Informatika dalam menunjang Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Membuka Isolasi Daerah;
3. Pembangunan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Mengembangkan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi Kerakyatan Secara Berkelanjutan dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
4. Pembangunan, Penyiapan dan Penataan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Kedua Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing Tinggi dan Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aksessabilitas dan Investasi Daerah ;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi dalam Rangka Pemerataan Pembangunan, Mengurangi Kesenjangan Daerah dan Pengembangan Daya Saing/Keunggulan Daerah dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ;
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan organisasi, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*ouputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).

1. **Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A).
21. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
22. **Maksud dan Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra SKPD ) Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2019-2024).
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B.
4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**Camat**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

**Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
2. Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
4. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
5. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. **Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan**

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
3. Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum**

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
2. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
4. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
5. Pelaksanaan urusan hukum;
6. Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
7. Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
8. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
11. Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;
12. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
13. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
2. Penyelenggaraan administrasi kepemerintahan;
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
6. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
7. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas**

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
7. Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
8. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
10. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban; dan
11. Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
6. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
7. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
8. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
9. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
6. Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
7. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
10. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
11. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **KECAMATAN KUALA MANDOR B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **CAMAT** | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Drs. YANSEN SIBARANI** | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina Tk. I | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19631101 198603 1 008 | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SEKRETARIS** | |  |  | |  | |
|  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **M A L U K, S.Pd** | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19660213 198608 1 001 | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **KEPALA SUB BAGIAN** | | | |  | | **KEPALA SUB BAGIAN** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Plt.TU & Kepegawaian,**  **Umum & Perlengkapan** | | | |  | | **KEUANGAN** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **IDA SUSANTI A.Md** | | | |  | | **SYAFARUDIN. S** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penata Muda | | | |  | | Penata Muda TK I | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19860815 2000903 2 005 | | | |  | | NIP. 19680429 198903 1 003 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **KEPALA SEKSI** | | | | | |  | **KEPALA SEKSI** | |  |  | **KEPALA SEKSI** | | |  | **KEPALA SEKSI** | |  |  | | | |
|  | **PEMERINTAHAN** | | | | | |  | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN** | |  |  | **EKONOMI DAN PEMBANGUNAN** | | |  | **Plt.KESEJAHTERAAN RAKYAT** | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SYARIF USMAN** | | | | | |  | **SYARIF ABUBAKAR** | |  |  | **HENDRA YUDHA, SE** | | |  | **IDAWANI** | |  |  | | | |
|  | Penata Tk I | | | | | |  | Penata Tk I | |  |  | Penata | | |  | Penata Muda | |  |  | | | |
|  | NIP. 19640101 198603 1 062 | | | | | |  | NIP. 19670404 198903 1 013 | |  |  | NIP. 19750813 200003 1 002 | | |  | NIP. 19690918 199603 2 006 | |  |  | | | |
|  |  | | | | | |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Tabel 2.1

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR

KECAMATANKUALA MANDOR B KAB. KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | BANYAKNYA | KETERANGAN |
| 1 | S1 | 6 |  |
| 2 | D3 | 4 |  |
| 3 | SLTA | 8 |  |
| 4 | SLTP | 1 |  |
| 5 |  |  |  |
| Jumlah | | 19 |  |

*Sumber : DUK Kecamatan Kuala Mandor B Kab.Kubu Raya, 2019*

Atau dapat digambarkan pada grafik seperti gambar berikut :

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 25 %, Diploma 15%, SLTA 50% dan SLTP 6%.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur KecamatanKuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KECAMATANKUALA MANDOR B

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH |
| 1. | Pembina | 2 orang |
| 2. | Penata | 13 orang |
| 3. | Pengatur | 3 orang |
| 4. | Juru | 1 orang |
|  |  |  |
| Jumlah | | 19 orang |

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan KecamatanKuala Mandor B 2019*

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur KecamatanKuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 2 orang, Penata 13 orang.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN KUALA MANDOR B

BERDASARKAN ESELON

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | ESELON | JUMLAH |
| 1. | III.a | 1 orang |
| 2. | III.b | 1 orang |
| 3. | IV.a | 4 orang |
| 4. | IV.b | 2 orang |
| 5. | Staf | 11 orang |
| Jumlah | | 19 orang |

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kantor Camat Kuala Mandor B, 2019*

Berdasarkan Tabel 2.3. tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon IIIa sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 11 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi. Sampai saat ini Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Kuala Mandor B mempekerjakan staf non PNS sebanyak 2 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Kuala Mandor B pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

KECAMATANKUALA MANDOR B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/  GOL. RUANG | JABATAN |
| 1 | Drs. YANSEN SIBARANI  NIP. 19631101 198603 1 008 | Pembina Tingkat I  (IV/b) | C A M A T |
| 2. | M A L U K, S.Pd  NIP. 19660213 198608 1 001 | Pembina  (IV/a) | Sekretaris Kecamatan |
| 3. | SYARIF USMAN  NIP. 19640101 198603 1 062 | Penata Tk. I  (III/d) | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4. | SYARIF ABUBAKAR  NIP. 19670404 198903 1 013 | Penata Tk. I  (III/d) | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat |
| 5. | HENDRA YUDHA, SE  NIP. 19750813 200003 1 002 | Penata  (III/d) | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan |
| 6. | SYAIFUL ANWAR  NIP. 19610525 198303 1 033 | Penata  (III/c) | Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 7. | SYAFARUDIN. S  NIP. 19680429 198903 1 003 | Penata  (III/c) | Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan |
| 8. | J A’ F A R  NIP. 19620102 198902 1 004 | Penata Muda Tk.I  (III/b) | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| 9. | THERESIA TITIN, S.sos  NIP. 19760607 201001 2 006 | Penata ( III/c) | Staf seksi Kesra |
| 10. | S A ' R A N I  NIP. 19641107 198903 1 012 | Penata Muda Tk.I  (III/b) | Staf Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| 11. | I D A W A N I  NIP. 19690918 199603 2 006 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Pemerintahan |
| 12. | WIDODO RUSNO PUTRO,S.E NIP. 19861120 201001 1 003 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat |
| 13. | IDA SUSANTI, A.Md  NIP. 19860815 200903 2 005 | Penata Muda (III/a) | Bendahara |
| 14. | HAJARYANTI, S.Sos  NIP. 19780122 201710 2 001 | Penata Muda (III/a) | Staf seksi pemerintahan |
| 15. | FERONIKA APRITA NIKI, A.Md  NIP. 19860412 201001 2 007 | Penata Muda (III/a) | Staf Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 16. | PUTRI PERMALA DEWI, A.Md  NIP. 19900917 201501 2 001 | Pengatur  (II/c) | Staf Seksi Rencana Kerja dan Keuangan |
| 17. | ANTONIA ALING  NIP. 19811030 200901 2 003 | Pengatur  (II/c) | Staf Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 18. | MIRWAN HADI  NIP. 19880306 2-1710 1 001 | Pengatur  (II/c) | Staf seksi Ekbang |
| 19. | JHONIJAR  NIP. 19620605 200701 1 031 | Juru Tingkat I (I/d) | Staf Seksi Pemerintahan |

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan KecamatanKuala Mandor B, 2019*

Kondisi sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

**Sarana dan Prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kuala Mandor B sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

Adapun fasilitas pendukung Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5.

SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA BARANG | KEADAAN BARANG | | |
| BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | Filling Besi  Meja Piket  Sepeda Motor  Mesin Ketik Manual  Meja Kerja Pegawai Non Struktural  Meja Kerja Pejabat Eselon III  Meja Kerja Pejabat Eselon II  Komputer PC  Unit Transceiver SSB Portable  Brand Kas  Note book/Laptop  Printer Epson L360  Kursi Kerja Pegawai Non Struktural  Mesin Potong Rumput  Kipas Angin  Professional Sound System  Kursi Rapat  Kursi Tamu  Printer Canon IP 2770  Mesin Absensi  Rak Kayu  Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1  1  5  1  12  2  6  6  1  1  5  1  12  2  1  3  1  50  2  1  1  8 |  |  |

1. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 2.6.**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Indikator Kinerja Lainnya | Target Renstra Perubahan SKPD Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | 100 / | 79,9 / baik | 80,1 / baik | 81 / baik | 82 / baik | 100 / sgt baik | 100 / sgt baik | 79,9 / baik | 80,1 / baik | 81 / baik | 82 / baik | 82 / baik | 86 / baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| sangat baik |
| 2 | Jumlah Desa Mandiri \* | - | - | 5 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 2 Desa | 3 Desa | 4 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 2 Desa | 2 Desa | 2 Desa | na | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | na |
| 3 | Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B \*) | - | - | B | C | C | CC | CC | B | B | C | C | C | BB | BB | na | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keterangan : | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* target 2019 desa mandiri na Menyesuaikan dengan perubahan renstra RPJMD 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| \*) Bukan Indikator Kinerja Utama | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 2.7.**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN** | **TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE** | | | | | **REALISASI CAPAIAN TAHUN KE** | | | | | **RASIO CAPAIAN TAHUN KE** | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | 2015 | 2016 | 2017 | **2018** | **2019** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  | **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROGRAM PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem Informasi Perencanaan SKPD | 7,500,000 | 8,490,000 | 9,339,000 | 10,272,900 | 11,300,190 | 7,500,000 | 8,490,000 | 9,339,000 | 9,759,255 | 10,735,181 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 8.54% | 7.44% |
|  | Penyelenggaraan Penyusunan Rencana strategis ( Renstra ) | 7,500,000 | - | - | - | - | 7,500,000 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12,500,000 | 7,024,650 | 12,000,000 | 20,000,000 | 21,000,000 | 3,901,704 | 3,854,704 | 4,392,978 | 19,000,000 | 19,950,000 | 0.31 | 0.55 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | 10.93% | 38.59% |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3,000,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,252,500 | 4,465,125 | 3,000,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,039,875 | 4,241,869 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 8.28% | 7.17% |
|  | Jasa Kebersihan Kantor | 38,920,000 | 38,920,000 | 44,802,600 | 1,100,000 | 1,200,000 | 38,920,000 | 38,920,000 | 44,802,600 | 1,045,000 | 1,140,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -50.13% | -50.64% |
|  | Penyediaan alat Tulis Kantor | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,624,000 | 15,500,000 | 16,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,624,000 | 14,725,000 | 15,200,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 2.71% | 1.66% |
|  | Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan | 8,000,000 | 8,567,000 | 9,837,000 | 10,328,850 | 10,845,293 | 8,000,000 | 8,567,000 | 9,837,000 | 9,812,408 | 10,303,028 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.27% | 5.19% |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,235,000 | 1,330,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.96% | 5.87% |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | - | - | 1,800,000 | 1,425,000 | 1,520,000 | - | - | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -2.33% | 0.00% |
|  | Penyediaan makan dan Minum | 8,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,555,000 | 6,840,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -2.09% | -3.08% |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah | 15,000,000 | 7,500,000 | 15,900,000 | 16,695,000 | 17,529,750 | - | 7,500,000 | 7,950,000 | 15,860,250 | 16,653,263 | - | 1.00 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 3.17% | 0.00% |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah | 25,000,000 | 29,550,000 | 43,520,000 | 45,696,000 | 47,980,800 | 24,780,000 | 29,500,000 | 43,070,000 | 43,411,200 | 45,581,760 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 13.93% | 12.96% |
|  | Penyusunan Standar Operasional | 10,000,000 | - | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 4,681,925 |  | 5,000,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.47 | - | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -11.23% | 2.27% |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | 12,600,000 | 43,577,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 12,600,000 | 43,575,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | - | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor | 9,000,000 | 40,500,000 | 129,320,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 40,500,000 | 118,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 10.76% | 10.89% |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas | 7,125,000 | 4,000,000 | 8,520,000 | 800,000 | 800,000 | 7,124,000 | 4,000,000 | 8,520,000 | 760,000 | 760,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -35.43% | -36.08% |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala komputer | 1,800,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 2.13% | 16.12% |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | 11,520,000 | - | 11,000,000 |  | 8,000,000 | 6,800,000 | - | 9,350,000 | - | 7,600,000 | 0.59 | - | 0.85 | - | 0.95 | -7.03% | 2.25% |
|  | Pengadaan Pakaian Olahraga | 3,250,000 | - | - |  | 8,000,000 | 3,520,000 |  |  | - | 7,600,000 | 1.08 | - | - | - | 0.95 | 19.74% | 16.64% |
|  | **PRROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Analisis Jabatan SKPD | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,615,000 | 1,999,900 | 1,999,900 | 5,658,888 | 5,985,000 | 6,284,250 | 0.40 | 0.40 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 5.76% | 25.73% |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 7,500,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 5,398,000 | 5,500,000 | 3,536,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | -5.97% | -0.60% |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,966,000 | 4,164,300 | 4,372,515 | 5,000,000 | 8,901,000 | 3,264,000 | 3,956,085 | 4,153,889 | 0.50 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | -15.25% | -3.64% |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun | 20,000,000 | 11,527,000 | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,922,500 | 19,497,950 | 10,291,000 | 9,000,000 | 8,977,500 | 9,426,375 | 0.97 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -13.08% | -13.53% |
|  | Laporan Penyelenggaranaan Pemerintahan daerah | 15,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 10,335,425 | 12,999,875 | 5,000,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -18.14% | -12.71% |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan | - | 24,500,000 | - | - | - |  | 24,499,700 |  | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas pengelolah Keuangan SKPD | 20,000,000 | 27,210,000 | 35,080,000 | 36,834,000 | 38,675,700 | 14,540,000 | 23,510,000 | 3,430,000 | 34,992,300 | 36,741,915 | 0.73 | 0.86 | 0.10 | 0.95 | 0.95 | 14.10% | 20.37% |
|  | Fasilitasi Penataan aset Pada SKPD | 10,000,000 | 6,132,000 | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,922,500 | 9,999,800 | 5,879,800 | 9,000,000 | 8,977,500 | 9,426,375 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -0.16% | -1.17% |
|  | **PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan | - | 10,000,000 | 13,250,000 | 13,912,500 | 14,608,125 | - | 9,909,700 | 13,250,000 | 13,216,875 | 13,877,719 | - | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | **PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Kualitas pelayanan publik | - | 5,804,500 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | - | 2,804,500 | 3,570,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | - | 0.48 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | **PEMBERDAYAAN KECAMATAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembinaan pemerintahan Desa | 25,000,000 | 22,854,250 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 22,205,000 | 21,950,000 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 12.05% |
|  | Pembinaan Sosial kemasyarakatan | 25,000,000 | 22,933,625 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 21,146,500 | 21,389,500 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 13.15% |
|  | pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan | 25,000,000 | 22,999,625 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 20,952,500 | 19,326,500 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 13.36% |
|  | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 27,500,000 | 24,820,000 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 23,707,275 | 22,627,275 | 37,223,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 8.47% | 10.59% |
|  | Penataan kearsipan | 14,000,000 | 14,000,000 | 18,531,000 | 19,457,550 | 20,430,428 | 12,049,975 | 13,393,975 | 16,899,999 | 18,484,673 | 19,408,906 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 7.85% | 10.00% |
|  | Penyusunan profil kecamatan | 14,000,000 | 7,000,075 | 15,185,000 | 15,944,250 | 16,741,463 | 13,147,850 | 6,369,925 | 15,185,000 | 15,147,038 | 15,904,389 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 3.64% | 3.88% |
|  | Fasilitasi Pelayanan Kependudukan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,707,000 | 11,242,350 | 11,804,468 | 9,938,325 | 9,938,550 | 10,515,000 | 10,680,233 | 11,214,244 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 3.37% | 2.45% |
|  | Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan | 25,000,000 | 25,000,000 | 31,062,000 | 32,615,100 | 34,245,855 | 24,999,825 | 24,999,825 | 30,978,000 | 30,984,345 | 32,533,562 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.50% | 5.41% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan perizinan | 40,480,000 | 31,385,350 | 14,550,500 | 15,278,025 | 16,041,926 | 34,479,500 | 28,284,625 | 13,651,100 | 14,514,124 | 15,239,830 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | -16.90% | -15.07% |
|  | Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan | 20,000,000 | 20,000,000 | 62,771,000 | 65,909,550 | 69,205,028 | 18,049,900 | 19,375,900 | 61,139,000 | 62,614,073 | 65,744,776 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 28.18% | 29.50% |
|  | terfasilitasinya pemberdayaan keluarga sejahtera | 21,500,000 | 23,000,000 | 23,541,000 | 24,718,050 | 25,953,953 | 19,610,900 | 20,710,900 | 21,886,000 | 23,482,148 | 24,656,255 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 3.84% | 4.69% |
|  | terfasilitasinya pembinaan posyandu | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | 2,280,000 | 2,559,000 |  | - | - | 0.76 | 0.85 | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | terfasilitasinya pembinaan monografi | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |  | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | meningktanya peran dan tugas RT/RW | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
|  | terfasilitasinya tapal batas antas desa | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 11,025,000 | 11,576,250 | 6,535,500 | 6,264,750 | 8,580,000 | 10,473,750 | 10,997,438 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 10.58% | 10.97% |
|  | terfasilitasinya penyusunan indeks kepuasan masyarakat | 10,000,000 | - | - | - | - | 2,550,000 | - |  | - | - | 0.26 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Kuala Mandor B melalui mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas namun memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal (*Faster, Better, and Cheaper*) kepada masyarakat tidak dapat memenuhi target/sasaran yang diinginkan.

Gambaran kondisi pengelolaan keuangan dalam Kecamatan Kuala Mandor B yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat setiap Tahun Anggaran berjalan seperti yang tercantum dalam tahapan pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
2. Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.

Adapun bentuk pelayanan masa kini antara lain :

1. Urusan Kependudukan

Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Kuala Mandor B cukup baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan pada pelayanan tersebut seperti lamanya pembuatan surat menyurat. Kemudian masalah lain yang menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja pelayanan yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang kadang-kadang masih mengalami ketidak ketersediaan pada waktu pelayanan. Selain itu masalah kinerja personil juga ikut mempengaruhi menurunnya kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki keahlian, kemampuan masih sangat rendah terbukti dengan hanya satu orang didalam SKPD yang dapat mengoperasikan sistem kependudukan. Adapun bentuk pelayanan di Seksi Pemerintahan seperti yang tertera di bawah ini :

1. Pembuatan KTP
2. Pembuatan Kartu Keluarga
3. Pembuatan Surat Pindah
4. Penyusunan Profil Kecamatan
5. Pembinaan Alokasi Dana Desa
6. Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW
7. Penyelesaian Tapal Batas antar desa
8. Pengurusan Administrasi Pernikahan
9. Urusan Pembangunan

Pada urusan pembangunan pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup baik, terbukti dengan pembuatan surat menyurat yang masih dapat ditolerir :

1. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
3. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
4. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan
5. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat pelayanan yang ditunjukkan juga sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan terselesainya kegiatan-kegiatan pada seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan seperti :

1. Pembuatan surat keterangan nikah, ahli waris
2. Pembuatan surat keterangan yang sifatnya bantuan sosial, raskin
3. Pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya masyarakat miskin
4. Fasilitasi kegiatan yang bersifat sosial
5. Urusan Kesekretariatan

Untuk urusan di sekretariat pada umumnya bentuk pelayanan sudah berjalan cukup baik, kegiatan yang dilaksanakan ada kaitannya dengan administrasi kantor seperti surat menyurat, kepegawaian, laporan keuangan dan aset kantor.

1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kuala Mandor B baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut :

**Analisis Kekuatan (Strenght)**

Dikaji dari analisis kekuatan (Strenght) bahwa terdapat kerjasama yang baik, sikap toleransi dan harmonisasi serta semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

**Analisis Kelemahan (Weakness)**

Dari sudut analisis kelemahan (weakness) bahwa sumber daya aparatur, anggaran dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pemenuhan sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana kerja secara optimal dengan kebutuhan hingga pada akhirnya dapat terlaksana pelayanan secara optimal.

**Analisis Peluang (Oppurtunity)**

Dipandang dari sudut analisis peluang (opportunity) bahwa Kecamatan Kuala Mandor B memiliki peluang yang besar di sektor perkebunan dan pertanian di masa yang akan datang dengan didukung berbagai potensi yang dimiliki.

**Analisis Hambatan (Threat)**

Analisis hambatan (threat) dari Kecamatan Kuala Mandor B yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah tingkat kesehatan rendah, infrastruktur kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/program seperti pembinaan dan koordinasi masih mengalami hambatan akibatnya pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terlaksana secara optimal.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Faktor- Faktor yang mempengaruhi, Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai

Bila dilihat dari rasio tingkat pendidikan, Kecamatan Kuala Mandor B tergolong SKPD yang lemah, hal ini dapat dilihat dari 52,9% PNS yang ada ditempati oleh lulusan SMA/Sederajat. Demikian pula dengan PNS yang menempati jabatan, dari 8 Jabatan Eselon yang ada, 4 diantaranya ditempati oleh PNS lulusan SMA/Sederajat.

Rendahnya sumberdaya aparatur yang dimiliki jelas menimbulkan permasalahan dalam pelayanan diantaranya :

* Kurangnya pemahaman tentang tupoksi masing-masing.
* Rendahnya pemahaman tentang peraturan perundangan.
* Ketidakpahaman penggunaan IT.

1. Rendahnya Loyalitas

Rendahnya loyalitas sebagian PNS Kecamatan Kuala Mandor B dapat dilihat dari :

* Jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
* Pelimpahan volume kerja sehingga menyebabkan terjadinya *overlapping* pekerjaan dan penumpukan volume kerja di sebagian PNS lain.

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Dalam menjalankan tugas sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparatur, karena kedua hal tersebut adalah faktor yang wajib dan sangat dibutuhkan oleh aparatur dalam menjalankan tugas. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat berakibat kepada menurunnya kualitas kinerja aparatur itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya-upaya penanganan antara lain :

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan pendidikan serta bimbingan teknis adalah salah satu cara yang diupayakan sehingga kemapanan skill dari aparatur dapat dicapai.
2. Selain itu diberikan pengarahan oleh *top management* mengenai loyalitas kerja yang diamanatkan oleh undang-undang dan diberlakukan *reward* dan *punishment* bagi setiap aparatur tanpa terkecuali.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana juga menjadi salah satu cara yang dilaksanakan agar dapat menunjang kinerja SKPD. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor penunjang terciptanya pola kerja yang baik.
4. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “***Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermatabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius***”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Kantor Camat Kuala Mandor B melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP).
2. Melakukanpenyusun dan dan pelaporan kinerja SKPD.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum di lingkungan SKPD.
4. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat dan bimtek.
5. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD**

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan program dan kegiatan yang disusun oleh Kecamatan Kuala Mandor B masih terdapat kendala terkait dinamika lingkungan strategis, yaitu :

* 1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
  2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah.
  3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, adapun struktur tata ruang terbagi menjadi 3 (tiga) sitem yaitu :

* 1. Sistem Pusat Pusat kajian
  2. Sitem Jaringan Prasaran Utama
  3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Berdasarkan struktur ruang untuk kecamatan yang ada di kabupaten kubu raya bahwa kecamatan termasuk dalam struktur ruang Sistem Pusat Pusat Kajian yang meliputi; Pusat kajian Nasional (PKN), Pusat kajian Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk lebih rincinya pembangian kegiatan di kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, meliputi kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup kawasan perkotaan Sungai Raya dan Kuala Mandor B (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kuala Mandor B, Kubu dan Batu Ampar (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar), Terentang Hilir (Kec. Terentang), Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
5. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Kuala Mandor B mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical succes factors*).

**Isu-isu Strategis Lingkungan Internal**

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan internal SKPD Kantor Kuala Mandor B terbagi atas berbagai bidang antara lain :

* Bidang Sumber Daya Aparatur

Dengan sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh kurangnya personil untuk mengisi jabatan staf disetiap seksi sesuai tupoksi dan volume pekerjaan serta terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan personil dan perlu mengikut sertakan aparat untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Seminar dan lain-lain guna peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi, perlu adanya rekrutmen PNS oleh Pemerintah Daerah hendaknya dilakukan secara selektif dan obyektif dan memperhatikan aspek pendidikan dan keahlian sesuai yang dibutuhkan, perlu adanya penerapan reward and punishment kepada PNS secara seimbang serta selalu melakukan supervise terhadap PNS setiap bulan untuk perbaikan kinerja.

* Bidang Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasaran kerja yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai untuk itu perlu adanya memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia secara efisien dan efektif guna memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta memprogramkan pengadaan saranan dan prasarana kerja dalam APBD sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh setiap instansi guna meningkatkan kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

* Bidang Anggaran

Masih terbatasnya dukungan aloksai penganggaran untuk belanja langsung (program/kegiatan) sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal, masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja tidak langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta minimnya dukungan sharing pembiayaan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga mempengaruhi optimalisasi tugas yang dilaksanakan. Dengan keterbatasan penganggaran yang dimiliki seperti yang tersebut diatas oleh sebab itu perlu adanya dukungan dalam mengalokasikan anggaran baik untuk kebutuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara proprsional dan sesuai kebutuhan riil berdasarkan standar harga dan standar pelayanan prima dan dapat mengalokasikan sharing pembiayaan yang seimbang terhadap pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kecamatan/Desa yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten.

**Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal**

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan eksternal SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B antara lain :

* Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah/medan Kecamatan Kuala Mandor B terdiri atas dataran dan sungai. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas, maka perlu adanya upaya perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana transportasi seperti jembatan, jalan, kendaraan, sehingga memudahkan atau mempercepat waktu, biaya antar desa yang ada.

* Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Kuala Mandor B. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui diklat, kursus, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta penambahan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B.

* Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya lowongan lapangan usaha/pekerjaan, dukungan terhadap modal usaha dan peningkatan frekwensi pembinaan kepada pencari kerja, jalur pemasaran produksi, dan pembinaan peningkatan semangat kerja/wirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B.

* Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B, seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa Terpencil, yang berada pada jalur sungai sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya. Perlu adanya dukungan pembenahan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi untuk wilayah yang tersebut di atas sehingga dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, derajat kesehatan serta aspek-aspek lain bagi masyarakat.

* Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih relatif rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil/pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat. Perlu adanya penambahan tenaga paramedis di daerah terpencil/pedalaman yang disebabkan karena luasnya jangkauan desa binaan sehingga dapat memberikan motivasi kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat

* Tingkat Pendelegasian Wewenang

Di Wilayah Kecamatan Kuala Mandor B terdapat beberapa Instansi Pemerintahan, seperti Kantor Camat, Polsek, Koramil, UPT. Puskesmas, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Kecamatan (BP3K) namun masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perlu adanya pendelegasian wewenang yang lebih besar dan tegas kepada instansi pemerintahan di kecamatan seperti Kantor Camat, UPT. Pendidikan, BP3K, KUA, Polsek dan Kormail sehingga dapat mempercepat/meningkatkan pelayanan dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.

* Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Kuala Mandor B baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi. Perlu adanya penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan secara bertahap/berjenjang antar desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelayanan dan percepatan rencana investasi pembangunan di wilayah khususnya dan kabupaten pada umumnya.

* Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Di samping berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap masih perlu mendapat perhatian dan pembinaan baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan (seperti IMB, SITU, SIUP, dan UUG), perencanaan, perpajakan dan retribusi seperti PBB, PPN, PPh, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi target dan realisasi dari pencapaian sasaran program/kegiatan dan pendapatan daerah. Perlu diintensifkan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan, perpajakan, dan perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan motivasi, peran aktif dan kesadaran masyarakat sehingga tercapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program sesuai harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
2. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
3. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
4. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
5. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
6. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
7. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
8. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra SKPD) Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | | **Target Kinerja** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatkan nilai SKM sesuai target | 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A | A | A | A | A | A |
| 2 | Meningkatnya kemandirian Desa | Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri | Meningkatnya Status Desa | 2 | Jumlah Desa yang naik kategori | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. **Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Kuala Mandor B melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Kuala Mandor B antara lain :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing | | | | | | | |
| MISI 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( Good and Clean Governace ) | | | | | | | |
| Sasaran Strategis di RPJMD-P | | | | S.1 Meningkatnya budaya kerja dan tata lelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan  berwibawa  S.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | | | |
| **Tujuan** | | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Arah Kebijakan** | |
| 1 | Meningkatkan Kepuasan pelayanan Kepada Masyarakat | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | 1 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui SOP dan perbaikan sarana prasarana | 1 | Meningkatkan Komitmen PNS untuk menerapkan SOP dan Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Publik. |
| 2 | Memprakarsa kemajuan dan pemberdayaan desa melalui penguatan kapasitas masyarakat. | 2 | Meningkatkan Partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa |
| 3 | Meningkatkan Persentase Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 3 | Meningkatkan peran serta Kecamatan dalam Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD | 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | 1 | Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Kuala Mandor B | 1 | Meningkatkan komitmen pejabat/staf di lingkungan Kecamatan Kuala Mandor B mampu memenuhi penilaian LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B peringkat “A” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing | | | | | | | |
| MISI 3 : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa Untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan Pada Nilai-nilai  Kearifan Lokal | | | | | | | |
| Sasaran Strategis di RPJMD-P | | | | S.1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi  S.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | | | |
| **Tujuan** | | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Arah Kebijakan** | |
| 1 | Meningkatnya kemandirian Desa | 1 | Meningkatnya Status Desa di Kecamatan | 1 | Mengoptimalkan Fungsi controling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa | 1 | Mengoptimalkan Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah |
| 2 | Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan dalam melakukan input update data | 2 | Mengoptimalkan Pembinaan untuk Update Informasi Kemajuan Desa |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan 2019 diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan peralatan gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala computer
17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Bitek Peraturan Perundang Undangan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ( LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ( LPPJ)
8. Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10. Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan
11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD
13. Fasilitasi penataan asset pada SKPD
14. Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
15. Pelaksanaan Perlombaan Desa
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
18. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
19. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
21. Peningkatan kualitas pelayanan publik
22. Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)
23. Program Pembinaan Mental Spritual Umat Beragama
24. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
25. Pemberdayaan Kecamatan
26. Pembinaan pemerintahan desa
27. Pembinaan sosial kemasyarakatan
28. Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan
29. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
30. Penataan kearsipan
31. Penyusunan profil kecamatan
32. Fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan
33. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan
34. Fasilitasi dan pembinaan alokasi dana desa (ADD)
35. Fasilitasi peningkatan pelayanan perizinan
36. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan
37. Fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera
38. Fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan
39. Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat

## Tabel 6.1.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | **Indikator Kinerja Kegiatan** | **Data Capaian Pada Tahun Awal**  **Perencanaan**  **2018** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung** | **Lokasi** | |
| **Tahun-1 (2019)** | | **Tahun-2 (2020)** | | **Tahun-3 (2021)** | | **Tahun-4 (2022)** | | **Tahun-5 (2023)** | | **Tahun-6 (2024)** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir** | |
|  | **Periode Renstra** | | **Jawab** |
|  | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
|  |  | **01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran** | **100%** | **100%** | **268.995.900** | **100%** | **308.780.400** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
| 1, Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | 12 Bulan | - | - | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
| 2. Meningkatnya kemandirian Desa | 2. Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri | 01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 18.000.000 | 12 Bulan | 24.000.000 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya | - | 9 Unit | 0 | 9 Unit | 0 | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 9 Unit |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.082.500 | 12 Bulan | 3.682.500 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 77.163.500 | 12 Bulan | 77.747.500 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 22.047.900 | 12 Bulan | 20.344.400 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.802.000 | 12 Bulan | 12.906.000 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.000.000 | 12 Bulan | 38.000.000 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.800.000 | 12 Bulan | 1.800.000 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat pegawai | 12 kali | 12 kali | 19.500.000 | 12 kali | 15.600.000 | 12 kali |  | 12 kali |  | 12 kali |  | 12 kali |  | 12 kali |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 2 Orang | 2 Orang | 25.200.000 | 2 Orang | 19.300.000 | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 10 Orang |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.19 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 866.400.000 | 12 Bulan | 95.400.000 | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | 12 Bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  |
|  |  | 01.23 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Jumlah Dokumen (SOP) SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **154.500.000** | **100%** | **192.203.500** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan Sepeda Motor | **-** | - | - | - | 90000000 | - |  | - |  | - |  | - |  | 7 Unit |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | 1 Paket | 123.000.000 | 1 Paket | 40.000.000 | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 5 Paket |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 02.09 | Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | 1 Paket | 123.000.000 | 1 Paket | 40.875.000 | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 5 Paket |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 02.09 | Pengadaan Meubelair | Jumlah pengadaan Meubelair Kantor |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | - | 1 Paket | 0 | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 3 Paket |
|  |  | 02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 2 Unit | 9 Unit | 11.100.000 | 9 Unit | 0 | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 9 Unit |  | 23 Unit |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 02.30 | Pemeliharaan rutin gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor | 3 Unit | 5 Unit | 2.400.000 | 5 Unit | 18.628.500 | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 21 Unit |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer | 3 Unit | 5 Unit | 2.400.000 | 5 Unit | 2.700.000 | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 5 Unit |  | 21 Unit |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **01.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur** | **100%** | **100%** | **21.000.000** | **100%** | **0** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 01.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya | 20 Setel | 22 Setel | 21.000.000 | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 62 Setel |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional | - | 22 Setel | 0 | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | 22 Setel |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 01.06 | Pengadaan Pakaian Olahraga | Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga | 20 Setel | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20 Setel |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** |  | **10850000** |  | **67.250.000** | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 05.07 | Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD | Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 05.10 | Penyusunan Analisis Jabatan SKPD | Jumlah dokumen Analisis Jabatan SKPD | 1 Dokumen | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 05.10 | Bintek Peraturan perunang undangan | Jumlah peserta Bintek | 2 org |  | 9000000 | 5 org | 67250000 | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **15.** | **Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | **tersdianya web kecamatan** | **-** | **0** | **0** |  | **15000000** | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **6 Kegiatan** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 15.01 | Pembuatan Website | Adanya web di masing2 kecamatan | - | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan | 15000000 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 3 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **15.** | **Program Pengembangan Nilai Budaya** | **Jumlah Event Seni dan Budaya** | **-** | **2 Kegiatan** | **0** | **2 Kegiatan** | **16250000** | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **2 Kegiatan** |  | **6 Kegiatan** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 15.01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | - | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan | 16250000 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 3 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 15.07 | Pagelaran Adat Budaya Daerah | Terlaksananya pagelaran adat budaya daerah | - | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 3 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **16.** | **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** | **Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** | **-** | **100%** | **26.960.000** | **100%** | **16250000** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 16.12 | Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan | Terfasilitasinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan | - | 1 kegiatan | 26.960.000 | 1 kegiatan | 16250000 | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 1 kegiatan |  | 2 kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **20.** | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 20.18 | Penyelenggaraan Open Turnamen Sepakbola Bupati Cup | Terselenggaranya kegiatan Turnamen Bupati Cup | - | - | - | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **22.** | **Program Pengendalian Kebakaran Hutan** | **Persentase Penurunan Titik Hotspot Dalam Setahun** | **-** | **70%** | **11.360.000** | **70%** | **3580500** | **70%** |  | **70%** |  | **70%** |  | **70%** |  | **70%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 22.03 | Koordinasi pengendalian kebakaran hutan | Berkurangnya kebakaran hutan | - | 1 Kegiatan | 11.360.000 | 1 Kegiatan | 3580500 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 4 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **33.** | **Program Pembinaan dan Pengambangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Desa** | **100%** | **100%** | **11.037.500** | **100%** | **4.084.100** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 33.26 | Penyusunan Database E-Formasi | dokumendatabase E-Formasi | - | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen |  | 1 dokumen |  | 1 dokumen |  | 1 dokumen |  | 1 dokumen |  | 3 dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 33.27 | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | dokumenStandar Kompetensi Jabatan SKPD | - | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 3 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 33.29 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Terlaksananya kualitas peningkatan pelayanan publik | - | 12 bulan | 5265000 | 12 bulan | 1.782.100 | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 33.32 | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | DokumenSurvey KepuasanMasyarakat (SKM) | - | 1 Dokumen | 5.772.500 | 1 Dokumen | 4725100 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 3 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 33.33 | Penyusunan Standar Pelayanan | Dokumen Standar Pelayanan SKPD | - | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 3 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **38.** | **Program Pemberdayaan Kecamatan** | **Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan** | **100%** | **100%** | **370.905.000** | **100%** | **219.599.200** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 38.01 | Pembinaan Pemerintah Desa | Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan desa | 5 Desa | 5 Desa | 47419800 | 5 Desa | 30398800 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.02 | Pembinaan Sosial Kemsyarakatan | Jumlah desa yang diberikan pembinaan sosial | 5 Desa | 5 Desa | 47419800 | 5 Desa | 30.398.800 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.03 | Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah desa yang diberikan pembinaan dan koordinasi | 5 Desa | 5 Desa | 45919800 | 5 Desa | 30398800 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.04 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah desa yang diberikan pembinaan ketentraman dan ketertiban | 5 Desa | 5 Desa | 46019800 | 5 Desa | 28998800 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.05 | Penataan Kearsipan | Jumlah pelaksanaan penataan kearsipan sesuai porsinya | 12 bulan | 12 bulan | 19966550 | 12 bulan | 0 | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | 12 bulan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.06 | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah dokumenProfil Kecamatan Kuala Mandor B | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16020000 | 1 Dokumen | 4686800 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 5 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.08 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan | Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan | 5 Desa | 5 Desa | 2360000 | 5 Desa | 1715900 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.09 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan | 5 Desa | 5 Desa | 32449400 | 5 Desa | 16291600 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.10 | Fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) | Jumlah fasititasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) | 5 Desa | 5 Desa | 12480000 | 5 Desa | 7752300 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.11 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan | Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan perizinan | 5 Desa | 5 Desa | 14360000 | 5 Desa | 1023200 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  |
|  |  | 38.13 | Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan | Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Wawasan Kebangsaan | 5 Desa | 5 Desa | 40952000 | 5 Desa | 37699500 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.16 | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera | 5 Desa | 5 Desa | 24999400 | 5 Desa | 8482900 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 38.19 | Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan | Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam Kecamatan | 5 Desa | 5 Desa | 10538450 | 5 Desa | 4279700 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  |  | Fasilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat | Jumlah fasilitasi kegiatan sosial masyarakat | - | 5 Desa | 10.000.000 | 5 Desa | 8482900 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **06.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu** | **100%** | **100%** | **40909800** | **100%** | **26282800** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen Lakip tahuanan SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6105000 | 1 Dokumen | 5061400 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 5 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran | Dokumen laporan keuangan semesteran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6065000 | 1 Dokumen | 1632800 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 5 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9918700 | 1 Dokumen | 5280100 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 5 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  |  | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Dokumen Rencana Strategis SKPD | - | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 06.08 | Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA | Dokumen rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA | - | 4 Dokumen | 13328200 | 4 Dokumen | 9227600 | 4 Dokumen |  | 4 Dokumen |  | 4 Dokumen |  | 4 Dokumen |  | 8 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 06.12 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 5492900 | 2 Dokumen | 5080100 | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | 8 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **17.** | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan** | **100%** | **100%** | **48.000.000** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 17.67 | Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD | Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan SKPD | 2 Orang | 2 Orang | 29900000 | 2 Orang | 0 | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 2 Orang |  | 12 Orang |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 17.87 | Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD | Dokumen Penataan Aset SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen dan 2 Orang | 29173000 | 2 Dokumen dan 2 Orang | 4084100 | 2 Dokumen dan 2 Orang |  | 2 Dokumen dan 2 Orang |  | 2 Dokumen dan 2 Orang |  | 2 Dokumen dan 2 Orang |  | 10 Dokumen dan 4 Orang |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **21.** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100%** | **100%** | **5.072.500** | **100%** | **3.580.500** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 21.80 | Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD | Terlaksananya sistem informasi, monitoring, evaluasi pembangunan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5072500 | 1 Dokumen | 3580500 | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen |  | 5 Dokumen |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **15.** | **Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** | **Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** | **-** | **100%** | **14950000** | **100%** | **24700000** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 15.01 | Pelaksanaan Lomba Desa | Jumlah Desa yang diberikan penilaian dalam Lomba Desa | - | 5 Desa | 14.950.000 | 5 Desa | 24700000 | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | 5 Desa |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | **15.** | **Program Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama** | **Persentase Peningkatan Pembinaan Mental dan Spiritual Umat Beragama** | **-** | **100%** | **19.010.200** | **100%** | **0** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **Kecamatan Kuala Mandor B** | **KKR** |
|  |  | 15.02 | Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten | - | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |
|  |  | 15.01 | Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan | - | 1 Kegiatan | 19.010.200 | 1 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | Kecamatan Kuala Mandor B | KKR |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra Perubahan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

* Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interprestasi;
* Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
* Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
* Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
* Cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
* Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
* Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan *stakeholders* dan pencapaian visi dan misi organisasi.

**Tabel 7.1**

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN**

**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Misi** | **Tujuan** | | **Indikator Tujuan** | | **Sasaran** | | **Indikator Sasaran** | | **Satuan** | **Kondisi Awal** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | |  | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024** |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | | **(4)** | | **(5)** | | **(6)** | | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** |
| 1 | Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance) | T.1 | Meningkatnya Budaya Kerja dan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | S.2. | Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2 | Nilai Sakip | S.3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan | 2 | Nilai Sakip | Predikat | CC | B | B | B | BB | BB | BB | BB |
| 3 | Opini BPK | 3 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Meningkatkan penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal | T.6 | Meningkatkan Kemandirian Desa | 1 | Indeks Desa Membangun | S.27 | Meningkatnya Status Desa | 1 | Peningkatan Jumlah Desa Mandiri | Desa | 0,00 | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 48,00 |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil, maka dipandang perlu menfokuskan kegiatan atau aktivitas instansi sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu langkah untuk menuju suatu pemerintahan yang baik, responsive terhadap aspirasi masyarakat dan juga dapat dikontrol oleh semua pihak, dilakukan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kuala Mandor B merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematik dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk mengevalkuasi kinerja tahun sebelumnya dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja SKPD pada tahun berikutnya.